

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH**

**Oleh:
Fladimir Edwin Mbon**

**Pembimbing:
Ch. Heni Kurniawan, S.E., M.Si.**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, 2) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan 3) Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 28 SKPD di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah responden sebanyak 122. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan memilih responden yang memenuhi kriteria yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package for Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha1 diterima), 2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha2 diterima), dan 3) Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha3 diterima). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata Kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kinerja SKPD Kabupaten Manggarai Barat.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparan, dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan anggaran.

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial. (Prihandini, 2011).

Bangun (2009) dalam tulisannya mengatakan perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu bagian penting dari karakteristik tujuan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Putra (2013) dalam tulisannya mengatakan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mahsun *et al.* (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas sebagai bagian dari terciptanya *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan

yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Sopanah dan Wahyudi (2010) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan acuan Putra (2013) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang sama akan digunakan dengan menambahkan satu variabel baru yaitu partisipasi penyusunan anggaran. Alasan dipilihnya variabel tersebut karena penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang berbeda.

Hasil penelitian Jalaluddin dan Bahri (2009), Bangun (2009), Prihandini (2011), dan Wulandari (2013) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Anggraeni (2009) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintah kabupaten Kota Labuhan Batu. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara parsial maupun simultan tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Labuhan Batu. Nugrahani (2009) juga meneliti mengenai pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan *self-efficacy* terhadap kinerja manajerial di Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian di kantor dinas pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Alasan dipilihnya kantor dinas pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai obyek penelitian karena berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa kinerja SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dari progres penyerapan APBD per September 2013 baru menyerap 30% dari yang seharusnya sudah harus mencapai rata-rata 75% (Sumber: BAPPEDA Kabupaten

Manggarai Barat, 2013). Berdasarkan laporan diatas, penulis ingin melihat apakah kinerja Kabupaten Manggarai Barat dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan menambahkan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel baru dalam penelitian ini. Alasan dipilihnya variabel tersebut karena penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini juga mengambil obyek penelitian yang berbeda yaitu di Kabupaten Manggarai Barat.

II. Landasan Teori

A. Anggaran

Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan lokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

B. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Bangun (2009) dalam tulisannya mengemukakan partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran.

C. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

D. Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mahsun *et al.* (2011) dalam akuntansi sektor publik menjelaskan bahwa aspek akuntabilitas publik merupakan salah satu dari tiga aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

E. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) dalam Mahsun *et. al* (2011:141) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Sedangkan definisi pemerintah daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 yaitu Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Hipotesis

1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Menurut Chong (2002) dalam Prihandini (2011), partisipasi anggaran merupakan sebuah proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Beberapa studi yang berkaitan dengan partisipasi anggaran antara lain Jalaluddin dan Bahri (2009), Wulandari (2013), Bangun (2009), dan Prihandini (2011) yang semuanya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang bertentangan, hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian Anggraeni (2009) dan Nugrahani (2009) yang dalam hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini maka akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan

kinerja di satuan pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Putra (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Kota Padang. Jalaluddin dan Bahri (2009) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Banda Aceh. Bangun (2009) juga dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, sehingga semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

3. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Setiawan (2012) dalam tulisannya menyebutkan bahwa dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Putra (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan positif antara akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial SKPD kota Padang. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang positif antara akuntabilitas publik dan kinerja aparat pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

III. Metodologi Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung.

B. Obyek, Populasi, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Obyek. Obyek atau lokasi pada penelitian ini adalah kantor dinas Pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat setingkat kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksi dari kantor dinas Pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat setingkat kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksi dari kantor dinas Pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*.

C. Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

1. Variabel Independen

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), dan akuntabilitas publik (X3).

2. Variabel dependen

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pemerintah daerah.

IV. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis presentase responden, uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Jumlah kuisioner yang disebar sebanyak 140 kuesioner yang terbagi ke dalam 28 SKPD dengan jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 16 kuesioner dan yang tidak terisi lengkap sebanyak 2 kuesioner.

A. Analisis Presentase

1. Berdasarkan jenis kelamin

Mayoritas responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah pria yaitu sebanyak 99 orang atau 81,1%, dan 18,9% responden lainnya adalah wanita.

2. Berdasarkan usia

Rentang usia responden antara 27 – 56 tahun dengan mayoritas responden yang menjadi sampel penelitian ini berusia 40 tahun sebanyak 10 orang atau sekitar 8,2%.

3. Berdasarkan pendidikan terakhir

Mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan terakhir D3 sebanyak 13 responden atau 10,7%, S1 yaitu sebanyak 103 orang atau 84,4%, dan S2 sebanyak 6 responden atau 4,9%.

B. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment*. Hasil penelitian dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel. Nilai r tabel untuk sampel penelitian sebanyak 122 adalah 0,117. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai r tabel semua butir pertanyaan lebih besar dari 0,117 maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini valid.

C. Uji Reliabilitas

Untuk menganalisis reliabilitas digunakan koefisien *Cronbach Alpha*, suatu instrumen dinyatakan andal jika memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,5. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel dalam penelitian ini lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

D. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif pada masing-masing variabel dikelompokkan ke dalam tiga interval kelas sebagai berikut:

Tabel 1
Pembagian Interval Kelas

Variabel	Mean	Keterangan
Partisipasi Penyusunan Anggaran	1,00 – 2,33	Rendah
	2,34 – 3,66	Sedang/Cukup tinggi
	3,67 – 5,00	Tinggi
Kejelasan Sasaran Anggaran	1,00 – 2,33	Rendah
	2,34 – 3,66	Sedang/Cukup tinggi
	3,67 – 5,00	Tinggi
Akuntabilitas Publik	1,00 – 2,33	Rendah
	2,34 – 3,66	Sedang/Cukup tinggi
	3,67 – 5,00	Tinggi
Kinerja	1,00 – 2,33	Rendah
	2,34 – 3,66	Sedang/Cukup tinggi
	3,67 – 5,00	Tinggi

1. Partisipasi penyusunan anggaran

Berdasarkan hasil analisis mengenai partisipasi penyusunan anggaran diperoleh nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,7596 dengan standar deviasi sebesar 0,92189. Berdasarkan pembagian kelas interval, maka nilai rata-rata sebesar 3,7596 termasuk dalam kategori tinggi.

2. Kejelasan sasaran anggaran

Berdasarkan hasil analisis mengenai kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai minimum 1,50 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,3770 dengan standar deviasi sebesar 0,55414. Berdasarkan pembagian kelas interval maka nilai rata-rata sebesar 4,3770 termasuk dalam kategori tinggi.

3. Akuntabilitas publik

Berdasarkan hasil analisis mengenai akuntabilitas publik diperoleh nilai minimum 1,44 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,3197 dengan standar deviasi sebesar 0,56323. Berdasarkan pembagian kelas interval maka nilai rata-rata sebesar 4,3197 termasuk dalam kategori tinggi.

4. Kinerja aparat pemerintah daerah

Berdasarkan hasil analisis mengenai kinerja diperoleh nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,5965 dengan standar deviasi sebesar 0,61412. Berdasarkan pembagian kelas interval maka nilai rata-rata sebesar 3,5965 termasuk dalam kategori sedang atau cukup tinggi.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normalitas pada model regresi diuji dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*.

Apabila hasil nilai probabilitas $> 0,05$ maka data normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas $> 0,05$ yaitu sebesar 0,777 maka dapat disimpulkan bahwa semua data dalam penelitian ini normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tidak terjadinya multikolinearitas dapat diketahui jika semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Variance Inflating Factor (VIF)* kurang dari 5 dan memiliki *tolerance value* lebih dari 0,5. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai

tolerance value dari tiap variable penelitian lebih dari 0,5 dan nilai *Variance Inflating Factor (VIF)* untuk tiap variable penelitian kurang dari 5. Dari hasil ini maka disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.881	1.135
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.642	1.557
	Akuntabilitas Publik	.658	1.519

3. Uji Heterokedastisitas

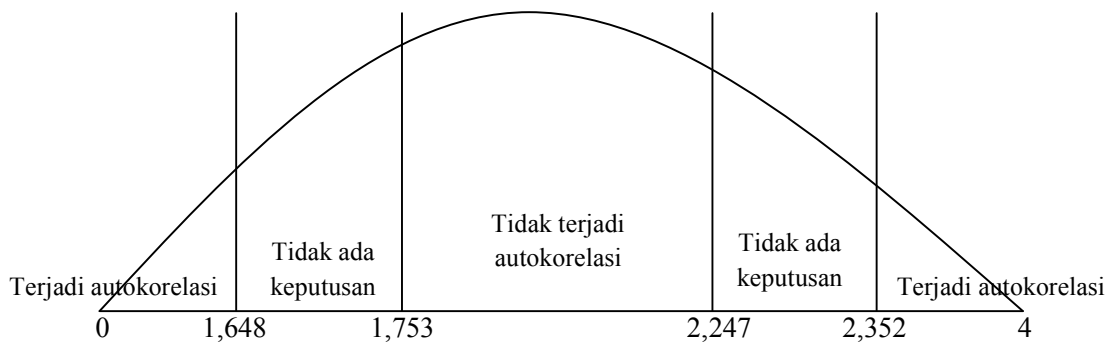
Uji heterokedastisitas dihitung dengan menggunakan uji *Glejser*. Bila terdapat variabel independen yang tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% (*probabilitas* (p) > 0,05) terhadap residual absolut maka tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas semua variabel > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3
Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.593	.240		2.476	.015
	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.021	.031	.066	.682	.496
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.037	.061	-.069	-.604	.547
	Akuntabilitas Publik	-.031	.059	-.060	-.530	.597

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Apabila D-W terletak antara du sampai 4-du maka tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi maka pengambilan keputusan hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:



Hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,806. Nilai Durbin Watson (DW) terletak antara du (1,753) sampai 4-du (2,247) maka tidak ada autokorelasi.

F. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,625 + 0,261 X_1 + 0,239 X_2 + 0,219 X_3$$

Keterangan: Y= Kinerja, X_1 = Partisipasi Penyusunan Anggaran, X_2 = Kejelasan Sasaran Anggaran, X_3 = Akuntabilitas Publik

1. Uji Koefisien Regresi secara Parsial

Untuk membuktikan apakah variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, maka digunakan analisis regresi secara parsial atau pengujian nilai t.

a. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Hasil analisis regresi untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,261, nilai probabilitas sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,101. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel. Dengan taraf signifikansi $\alpha : 0,05$ dan derajat bebas (db: $n - 1 - k$), $(122 - 1 - 3) = 118$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,658. Hasil analisis variabel partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (5,101) > t_{tabel} (1,658)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima, artinya

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

b. Kejelasan Sasaran Anggaran

Hasil analisis regresi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,239, nilai probabilitas sebesar 0,018 dan t hitung sebesar 2,406. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel. Dengan taraf signifikansi α : 0,05 dan derajat bebas (db: $n - 1 - k$), $(122 - 1 - 3) = 118$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,658. Hasil analisis variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} $(2,406) > t_{\text{tabel}}$ $(1,658)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima, artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

c. Akuntabilitas Publik

Hasil analisis regresi untuk variabel akuntabilitas publik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,219, nilai probabilitas sebesar 0,026 dan t hitung sebesar 2,261. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel. Dengan taraf signifikansi α : 0,05 dan derajat bebas (db: $n - 1 - k$), $(122 - 1 - 3) = 118$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,658. Hasil analisis variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} $(2,261) > t_{\text{tabel}}$ $(1,658)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima, artinya akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,374. Hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik mampu menjelaskan perubahan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 37,4% sedangkan sisanya 62,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

V. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, secara parsial partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan

anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

VI. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu dari 140 kuesioner yang disebar ke dalam 28 SKPD, 16 diantaranya tidak/belum dikembalikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesibukan responden dan juga beberapa responden tidak bertemu secara langsung dengan peneliti. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan lain yaitu identitas responden tidak terisi secara lengkap, sehingga menyulitkan peneliti untuk mengetahui karakteristik responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner.

VII. Saran

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Selain itu responden juga diingatkan agar mengisi identitas responden secara lengkap sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk mengolah data presentase responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. (2009). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Kota Labuhan Batu*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Bangun, A. (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat: *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Keadaan sampai 30 September 2013 (Triwulan III)*.

- Jalaluddin dan Dafi B. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 2, No. 1. Januari 2009, Hal. 44-53.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H.A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Andi, Yogyakarta.
- Nugrahani. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan *Self-Efficacy* terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Prihandini, A.N. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putra, D. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Salemba Empat.
- Setiawan, W. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sopannah dan Wahyudi. (2010). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi*, Universitas Widya Gama Malang dan Malang Corruption Watch (MCW).
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wulandari, N. (2013). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.